

# Pemaparan Rumusan Rekomendasi FGD STANDAR DATA SPN

Tim Perumus FGD Standar Data

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
2015

December 6, 2015

## Tim Perumus FGD Standar Data

1. Syafrizal Sy
2. I Made Wiryana
3. Budi Purwaka
4. Kurniawan
5. Rocky Gunung Hasudungan
6. Fadhilah Mathar
7. Arif Rifai Dwiyanto
8. Jabaraudin

- 1 Peran Stakeholder
- 2 Kebutuhan Stakeholder terhadap Standar
- 3 Saran-saran
- 4 Tindak Lanjut

## (a) Pengembangan

### **Perancangan, penyusunan, dan penetapan peraturan:**

- Pada perancangan standar harus lebih melibatkan stakeholder yang berkompeten dalam bidang pengelolaan data.
- Penyusunan dan penetapan standar data sistem pendidikan nasional perlu melibatkan beberapa kementerian misalnya Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag, Keminfo, Kemenristekdikti, BPS, dll.

## (b) Implementasi

### Sosialisasi:

- BSNP melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder terkait.
- Pada kegiatan sosialisasi BSNP menjelaskan manfaat kongkrit dari implementasi standar data bagi stakeholder.

## (b) Implementasi

### Program kerja::

- Stakeholder perlu menyusun program kerja/kegiatan serta menyiapkan anggaran untuk implementasi standar.
- Pangkalan data pendidikan yang sudah saat ini seperti Dapodik, EMIS, PD-DIKTI, dll perlu menyesuaikan dengan standar data sehingga dapat melakukan interoperabilitas.
- Pengelola pangkalan data perlu menyediakan layanan data sesuai dengan standar yang disusun.
- Perlu dibangun RML (Repositori Metadata dan Layanan) sebagai rujukan layanan data dan metadata
- Kementerian terkait ,seperti Kemdagri perlu membuka layanan untuk dapat diperoleh data-data referensi dan data kependudukan (terkait NIK).

## (b) Implementasi

- **Penganggaran:**

Menyiapkan pengalokasian anggaran untuk penyesuaian pangkalan data agar sesuai dengan standar.

- **Advokasi:**

Stakeholder berperan aktif dalam sinkronisasi dengan sistem-sistem yang sudah ada.

- **Kendala:**

- Resistensi pengelola pangkalan data (egosektoral)
- Keterbatasan anggaran
- Keterbatasan sumber daya manusia untuk siklus pengelolaan data (sumber data, pengumpul, pengolahan, dan pendayagunaan data)
- Regulasi yang tidak harmonis.

## (b) Implementasi

### ● Solusi:

- Perlu disusun rancangan regulasi dan harmonisasi kebijakan sekurang-kurangnya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang mengatur strategi implementasi standar data sistem pendidikan nasional serta harmonisasi regulasi lainnya yang terkait dengan kebijakan interoperabilitas sistem informasi.
- Penyediaan anggaran dan sumber daya yang memadai.
- Bimbingan teknis terkait standar data ini kepada pengelola dan pengembang sistem informasi.

## (c) Pencapaian

### Pencapaian:

- Stakeholder memahami, mendukung, dan menerapkan standar data.
- Stakeholder menyusun aturan teknis (juklak) yang mengacu pada standar data.

## (c) Evaluasi

### Evaluasi:

- Stakeholder mengevaluasi kesesuaian pangkalan data yang ada dengan standar data.
- Stakeholder memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.

## (2) Kebutuhan Stakeholder terhadap Standar

### **Kebutuhan Stakeholder terhadap Standar:**

- Perlu dikembangkan standar skema data pendidikan nasional.
- Perlu disusun aturan/standar semantik.
- Mengidentifikasi kementerian/lembaga yang mengelola data pendidikan.
- Perlu disusun strategi implementasi standar data.

# Saran-saran

## Saran-saran:

- Perlu penjabaran yang lebih teknis dari standar data (aspek teknis).
- Perlu disusun standar pelengkap sebagai turunan dari standar data.
- Untuk implementasi standar data perlu dilakukan koordinasi dengan K/L yang mengelola data pendidikan.
- Perlu dukungan anggaran untuk pengembangan lebih lanjut dari standar data.

# Tindak Lanjut

## Tindak Lanjut:

- Perlu penjabaran yang lebih teknis dari standar data.
- Perlu dilakukan demonstrasi konsep (Proof of Concept) dan pembuatan model/ccontoh interoperabilitas data pendidikan.
- Perlu payung hukum yang lebih tinggi yang dapat mendorong stakeholder dalam dan lintas kementerian/lembaga untuk mengimplementasikan standar ini.

# Trimakasih